

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Soppeng No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng (Struktur Organisasi)

Bappelitbangda Kabupaten Soppeng sebagai institusi perencanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab terhadap fungsi koordinasi, pengembangan, penelitian, monev dan perencanaan pembangunan. Dalam menjalankan fungsinya Bappelitbangda menggunakan dana APBD Perubahan T.A. 2018 sebesar **Rp. 7.552.316.551** yang terbagi kedalam 2 (dua) jenis belanja yakni Belanja Tidak Langsung **Rp.1.604.549.942** dan Belanja Langsung **Rp. 5.947.766.609,-**.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Soppeng didukung oleh Sumber daya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Sukarela (PHTL). Gambaran SDM dilihat dari fungsinya, terdapat kelemahan berkaitan dengan kondisi internal organisasi yang berpotensi menghambat peningkatan produktifitas kerja, antara lain belum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

terpenuhinya beberapa tenaga staf, tenaga teknis dan tenaga fungsional lainnya (seperti : Peneliti, pustakawan, arsiparis dan sebagainya, Fungsional Perencana maupun tenaga fungsional peneliti. Berdasarkan struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Tahun 2018 di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 44 orang, terdiri atas PNS sebanyak 27 Orang dan tenaga PHTL sebanyak 17 orang.

Pegawai pada Bappelitbangda dapat dilihat melalui grafik yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Bappelitbangda berdasarkan pendidikannya Tahun 2018

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PHTL	
1	SD/Sederajat	0	0	0	0
2	SMP/Sederajat	0	0	0	0
3	SMA/Sederajat	3	0	4	7
4	D1-D3	0	0	3	3
5	S1/Sederajat	14	0	10	24
6	S2	10	0	0	10
7	S3	0	0	0	0
JUMLAH					44

Tabel 1.2

**Pegawai Bappelitbangda berdasarkan golongannya
Tahun 2018**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	0	2
3	Golongan III	23	0	23
4	Golongan IV	2	0	2
JUMLAH				27

Disamping kelemahan yang dikemukakan di atas terdapat pula beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola organisasi yakni adanya motivasi kerja yang tinggi dari aparat dan dukungan pimpinan yang konsisten dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik serta kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

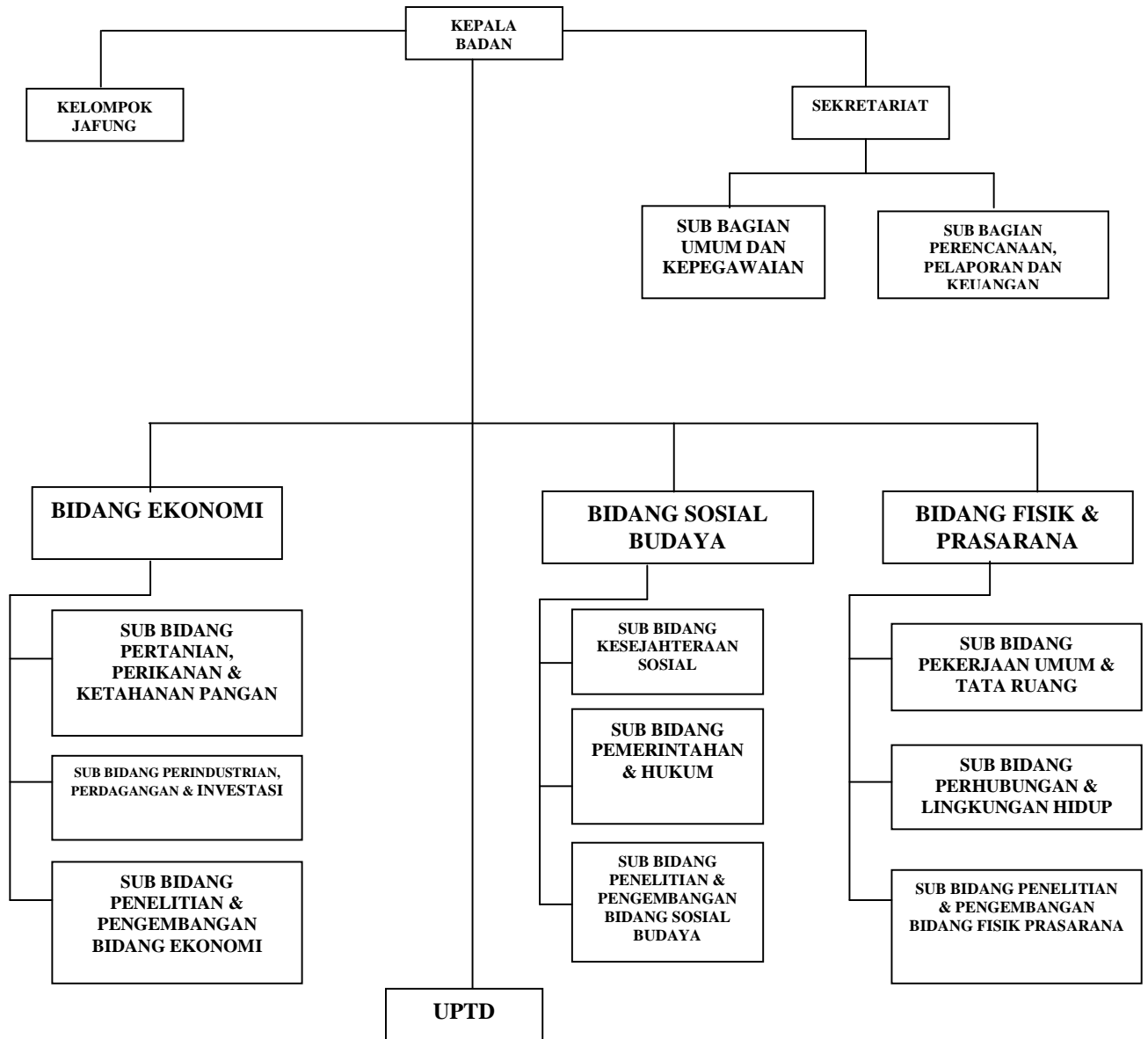
Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial dan budaya.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 66 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural

pada Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng, struktur Bappelitbangda adalah sebagai berikut:



1. KEPALA BADAN

Bappelitbangda di pimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan Pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Badan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Merumuskan Program Kerja sesuai Renstra Badan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Badan;
- d. Membina kepala Sekretariat dan Para Kepala Bidan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan, melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

- i. Melaporkan dan memberi saran kepada pimpinan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi pengoordinasian penyusunan Rancangan dan penetapan serta pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan pembangunan manusia dan masyarakat, dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkaitan dengan pengoordinasian Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang yang terkait dengan dokumen Perencanaan;
- l. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan Program dan kegiatan di Bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah dan program kegiatan dibidang Fisik dan Prasarana;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan

masyarakat, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya dan infrastruktur dan pengembangan Wilayah;

- o. Menilai prestasi kerja kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat Dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan Urusan Umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas dalam lingkungan Badan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Merencanakan, Mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan;
- j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- k. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- l. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- m. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- o. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan

tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;

3. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengordinasikan yang melaksanakan program dan kegiatan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan lingkungan hidup serta penelitian dan pengembangan Bidang Fisik Prasarana sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman yang berlaku, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD khususnya yang terkait dengan bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

- serta Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana;
- e. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Fisik Prasarana yang meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Penelitian dan Pengembangan Bidang Sarana Prasarana serta mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang, Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Fisik Prasarana yang meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana;
 - g. Melakukan pembinaan dan melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Penelitian dan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana;
 - h. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Fisik dan Prasarana;
 - i. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan

- Hidup serta penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga yang berkaitan dengan bidang Fisik dan Prasarana, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang Fisik dan Prasarana dalam lingkup tugasnya;
 - k. Melakukan monitoring pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan serta mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di Bidang Fisik dan Prasarana;
 - l. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Penelitian dan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana;
 - m. Menyusun laporan dan memberi saran kepada pimpinan terkait pelaksanaan tugas perencanaan dibidang Fisik dan Prasarana;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. BIDANG EKONOMI

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengordinasikan yang melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman yang berlaku, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- d. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD khususnya yang terkait dengan bidang Ekonomi yang meliputi bidang Pertanian, Pangan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Investasi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;

- f. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi serta mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang, Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang Ekonomi;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi;
- h. Melakukan pembinaan dan melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi;
- i. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Ekonomi;
- j. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga yang berkaitan dengan bidang Ekonomi, serta melaksanakan Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah dibidang Ekonomi dalam lingkup tugasnya;

- l. Melakukan pemberian dukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi serta mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di Bidang Ekonomi;
- m. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi;
- n. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Perencanaan di Bidang Ekonomi;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;

5. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan yang melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sosial Budaya yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman yang berlaku, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- d. Mengatur Pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD khususnya yang terkait dengan Sosial Budaya yang meliputi bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya;
- f. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Ekonomi yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya serta mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang, Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang Sosial Budaya;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Sosial Budaya yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Bidang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

- Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya;
- h. Melakukan pembinaan dan melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya;
 - i. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Sosial Budaya;
 - j. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga yang berkaitan dengan bidang Sosial Budaya, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya dalam lingkup tugasnya;
 - l. Melakukan monitoring pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Sosial Budaya yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemerintahan dan Hukum serta penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya;

- m. Menyusun laporan dan memberi saran kepada pimpinan terkait pelaksanaan tugas perencanaan dibidang Sosial dan Budaya;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappelitbangda Kabupaten Soppeng kurang memadai. Artinya sarana dan prasarana yang dimiliki Bappelitbangda belum mampu menopang secara optimal beban kerja yang besar dan dinamika perencanaan yang kompleks, adapun sarana dan prasarana pendukung yang ada saat ini diklasifikasikan menurut fungsinya. Pada umumnya sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Tahun 2018

Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)	KET
TANAH	1	128,800,000,00	
a. Tanah Lokasi Gabungan Dinas	1	128,800,000,00	
PERALATAN DAN MESIN	650	1.738.795.583,23	
a. Alat-alat Besar			
b. Alat-alat Angkutan	11	301.199.000,00	
c. Alat-alat Bengkel dan alat Ukur			
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan			
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	631	1.359.452.593,23	
f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	8	78.143.990,00	
g. Alat-alat Kedokteran			
h. Alat-alat Laboratorium			
i. Alat-alat Keamanan			
GEDUNG DAN BANGUNAN	5	21,752.256.799,00	
a. Bangunan Gedung	5	21,752.256.799,00	
b. Bangunan Monumen			
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4	366.844.500,00	
a. Jalan dan Jembatan			
b. Bangunan Air/Irigasi			
c. Instalasi	1	82.412.000,00	
d. Jaringan	3	284,432,500,00	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ASET TETAP LAINNYA	0	0	
a. Buku Perpustakaan Barang Bercorak	0	0	
b. Kesenian/Kebudayaan			
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan			
KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	0	0	
	650	23.986.696.882,00	

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (SKPD) BAPPELITBANGDA SOPPENG



RUANG PUBLIK

[INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH \(ILPPD\) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015](#)
[INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH \(ILPPD\) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015](#)berikut a [...]

[REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN 2015](#)
 Watansoppeng 1 Juni 2016. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab.Soppeng Kamis 19 Mei 2016, DPRD [...]

[PENYULUSURAN JARINGAN IRIGASI TODDANG SALOE](#)
 Watansoppeng 21 April 2016 , Pelaksanaan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSTEK [...])

membangun sistem informasi yaitu berupa WEB BAPPEDA.

1.5. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Bappelitbangda Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini :

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERS ENTA SE
TOTAL BELANJA	7.552.316.551,-	6.796.806.435,-	755.510.116,-	90,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.604.549.942,-	1.616.087.934,-	-11.537.992,-	100,72
- Belanja Pegawai	1.604549942,-	1.616.087.934,-	-11.537.992,-	100,72
BELANJA LANGSUNG	4.532.865.869,-	3.668.762.700,-	864.103.169,-	87,10
- Belanja Pegawai	682.625.000,-	608.087.000,-	74.538.000,-	89,08
- Belanja Barang & Jasa	4.479.672.709,-	3.893.943.301,-	675.729.408,-	84,92
- Belanja Modal	5.947.766.609,-	768.688.200,-	16.780.700,-	97,86

1.6. Permasalahan Utama Dalam Perencanaan Pembangunan

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan-perubahan serta banyaknya peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan yang menuntut penguasaan teknis perencanaan yang cepat.

2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis (Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD) yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.
3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
5. Kompetensi SDM perencana belum optimal, termasuk belum optimalnya kapasitas analitik SDM perencana.
6. Belum optimalnya penyediaan data-data statistik pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya pemakaian alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Matriks IKU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. 1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kab. Soppeng yaitu sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tertuang didalam RPJMD 2016 -2021.

Visi yang dituangkan dalam Renstra Bappelitbangda 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
YANG TERPADU, ASPIRATIF DAN RESPONSIF”**

Visi Bappelitbangda Kabupaten Soppeng diatas memiliki makna: **Terpadu**, perencanaan yang mampu saling mendukung antar sektor, antar awaktu, sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhan yang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi kedepan. **Aspiratif**, artinya dalam penyusunan dokumen perencanaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. **Responsif** dimaknai sebagai upaya yang dilakukan dengan cepat untuk menanggapi lingkungan dan isu strategis yang dinamis. Berbagai isu stretegis tetap menjadi konsen dalam penyusunan perencanaan, dalam artian muatan dari dokumen perencanaan pembangunan tidak lepas dari berbagai isu seperti isu kemiskinan, keadilan, pengangguran, gender, lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, responsif diartikan sebagai kemampuan melihat ke bawah (berbasis masyarakat) dan melihat ke atas (terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi).

Untuk mewujudkan visi BAPPELITBANGDA Kabupaten Soppeng 2016-2021 tersebut, maka disusunlah **misi** yang menjadi tanggung jawab institusi, yakni :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Misi pertama, meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pengendalian terpadu. Arah kegiatan tersebut memiliki manfaat mengenai dinamika proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

Misi kedua, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik pula dengan memastikan data tersebut valid/akurat, *up to date*, aktual dan tersedia serta mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi Bappelitbangda tersebut perlu ditetapkan tujuan Bappelitbangda Kab. Soppeng dalam kurun

waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, Bappelitbangda Kabupaten Soppeng sebagai institusi perencana berkewajiban meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terhadap sasaran RPJMD, Bappelitbangda bertanggungjawab langsung terhadap Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja dimana indikatornya adalah penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang mutlak 100% setiap tahunnya, sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tadi maka tujuan dan sasaran Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, Pengendalian, Evaluasi pembangunan daerah	<p>Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD</p> <p>Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional</p>
2.	Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
3.	Meningkatnya Kinerja aparatur	<p>Meningkatnya efektifitas dan efisien pengelolaan administrasi umum dan keuangan</p> <p>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prsarana kantor</p>

2.1.3 Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPELITBANGDA tahun 2017:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD	Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Ada
		Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	100%
2	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional	Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana	8 Orang
4	Meningkatnya efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan	Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
	Keuangan.	Administrasi Umum dan Keuangan.	
5.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik.	100%

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Bappelitbangda Kabupaten Soppeng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Kepala Bappelitbangda Nomor 050/06/SK-BAP/I/2017. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen	Ada
2.	Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100
3.	Persentase penjabaran Kegiatan RKPD ke dalam	%	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

APBD

4.	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	%	100
5.	Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencanaan	Orang	8
6.	Presentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	%	100
7.	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	%	100

2.1.5. Perjanjian Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2018
Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan Regulasi	100 %
	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	2 Dok

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Musrenbang	5 Dok
Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok dan Perubahan	2 Dok
Asistensi Penyusunan RAPBD	Jumlah SKPD yang diasistensi	38 SKPD
Pendampingan Penyusunan Renstra	Jumlah SKPD yang didampingi Penyusunan Renstra	37 SKPD
Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Peserta Sosialisasi	4 paket
Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 Dok
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	2 Dok
Koordinasi Perencanaan Responsif Gender	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG	38 SKPD
Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 Dok
Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 Dok
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi	400 Org

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yang didampingi	12 Desa
Pengumpulan, Updating dan Analisis data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok
Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1 Dok
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen SIPD	1 Dok
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/ Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen	1 Dok
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/ Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	1 Dok
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/ Informasi Kebutuhan Perencanaan	Jumlah Dokumen	1 Dok

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Bidang Fisik dan Prasarana		
	Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	6 SKPD
Meningkatnya Jumlah Perencana yang memiliki Kompetensi dasar Perencanaan dan Kapasitasnya sesuai dengan tugas Fungsional	Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya dalam hal Perencanaan	100%
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Tenaga Perencana yang Lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bimtek	8 Org
	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Workshop	100 Org
Meningkatnya sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	% Program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKP	100 %
	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Jumlah Dokumen Revisi	1 Dok
	Pengendalian dan	Jumlah Dokumen	1 Dok

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Hasil Evaluasi	
	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Ranperda Perubahan RPJMD	1 Ranperda
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monev pelaksanaan APBD dan APBN rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng	2 Dok
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten	1 Dok
	Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key Performance Indicator (KPI)	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Dok
	Pembangunan Sistem Informasi Monitorin dan Evaluasi	Jumlah Aplikasi/ Software	1 Aplikasi
Meningkatnya efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	Program Pelayanan Perkantoran	% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/	13 Unit

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Operasional	
	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Peralatan Kebersihan	16 Org, 20 Jenis
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/ Penerangan bangunan	20 Buah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	10 Terbitan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Gas	12 Kali
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.150 Kali
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	4 Paket
Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	0
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Mesin foto copy	1 Unit
	Lemari	4 unit
	Papan Nama Sekretariat	3 Unit
	Laptop	5 unit
	Printer	5 unit
	Meja Kerja	18 unit
	Meja Rapat	1 set
	Kursi kerja	18 buah
	Kursi Rapat	100 buah
	Kursi tunggu	1 buah
	Kompor Gas	1buah
	Kulkas 2 Pintu	1 buah
Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	
	- Roda 2	12 Unit
	- Roda 4	1 Unit
Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	20 Unit
	- AC	
	- Mebeleur	1 Paket
	- LCD	2 Unit
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	
	- Komputer/PC	12 Unit
	- Notebook	15 Unit
	- Printer	15 Unit
Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	% ASN Berkinerja Baik (SKP)	100 %
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100 %
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD - Laporan Kinerja Bappelitbangda - LPPD dan LKPJ Bappelitbangda - RKA Pokok dan Perubahan - Renstra Bappelitbangda dan Renstra Perubahan	7 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semester/ Akhir Tahun	2 Dok

2.1.6. Perjanjian Kinerja (keterkaitan antara RPJMD dan Renstra)

Indikator Sasaran RPJMD	Target 2018
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian setiap kinerja sasaran dilakukan analisis:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja. Secara matematis, dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

95 s/d 100 = Sangat berhasil

80 s/d <95 = Berhasil

50 s/d <80 = Cukup berhasil

0 s/d <50 = Kurang berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Sedangkan indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Adapun capaian kinerja Bappelitbangda yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2019
1.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100
3.	Persentase penjabaran Kegiatan RKPD ke	%	100	100	100	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	dalam APBD					
4.	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100
5.	Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencanaan	Orang	8	0	4	11
6.	Presentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	%	100	100	100	100
7.	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam	%	100	Ada	100	Ada

Kondisi Baik

Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD mencapai 100% dikarenakan Sinkronisasinya Perogram/kegiatan yang ada di dalam RPJMD dan Renstra SKPD sehingga beberapa program yang ada di RPJMD dapat terjabarkan ke RKPD sehingga Muda mengikuti program yang ada di sistem aplikasi penganggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Bappelitbangda Kabupaten Soppeng dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD	1 Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dok	Ada	Ada	100.00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ke dalam APBD	2	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100,00
	3	Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100,00
Rata-rata capaian						100,00

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini mencapai target dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD** ini sebesar 100,00 persen.

b. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target renstra 2018	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini s.d. 2018	Capaian (%)
1	Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dok	Ada	Ada	100.00
2	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penjabaran kegiatan	%	100,00	100,00	100,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target renstra 2018	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini s.d. 2018	Capaian (%)
RKPD ke dalam APBD				

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD** disebabkan oleh beberapa hal, dukungan SDM aparat Bappelitbangda yang semakin meningkat sehingga dokumen-dokumen perencanaan yang ada telah sesuai dengan kaidah dan regulasi yang ada. Selanjutnya, kegagalan pencapaian target disebabkan karena sistem aplikasi penganggaran yang tidak mampu menyesuaikan dengan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD yang baru sehingga masih menggunakan program lama. Namun, untuk tahun selanjutnya aplikasi ini telah menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang terbaru.

Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100$$

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Jumlah Program RKPD Tahun 2018	= 149	
Jumlah Program RPJMD Tahun 2018	= 149	X 100
	= 100,00	

Perbandingan Kegiatan RKPD kedalam APBD

No.	SKPD	RKPD	Penjabaran Anggaran 2018	Capaian (%)
1.	Dinas Pendidikan	59	59	100
2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	31	31	
3.	Dinas Kesehatan	73	73	100
4.	Dinas PU & Penataan Ruang	59	59	100
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	30	100
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21	21	100
7.	Badan Pengangulangan Bencana	20	20	100
8.	Dinas Sosial	26	26	100
9.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	19	19	100
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	24	24	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perlindungan Anak				
11.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	39	39	100
12.	Dinas Lingkungan Hidup	28	28	100
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	28	28	100
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	33	100
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	30	30	100
16.	Dinas Perhubungan	32	32	100
17.	Dinas Informasi dan Komunikasi	35	35	100
18.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	36	36	100
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23	23	100
20.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	31	31	100
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25	25	100
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25	25	100
23.	Dinas Pertanian	77	77	100
24.	BAPPELITBANGDA	46	46	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

25.	BPKD	50	50	100
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	34	34	100
27.	SETDA	105	105	100
28.	Sekretariat DPRD	34	34	100
29.	Inspektorat	22	22	100
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26	26	100
31	Kec. Lalabata	96	96	100
32	Kec. Liriaja	59	59	100
33	Kec. Citta	19	19	100
34	Kec. Lirilau	70	70	100
35	Kec. Ganra	22	22	100
36	Kec. Marioriawa	85	85	100
37	Kec. Marioriwawo	44	44	100
38	Kec. Donri-Donri	22	22	100
	Jumlah	1.507	1.507	100

Persentase Penjabaran Kegiatan RKPD ke dalam APBD

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Kegiatan RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan APBD Tahun berkenaan} = 1.507}{\text{Jumlah Kegiatan RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan} = 1.507} \times 100\% = 100,00$$

Karena kesesuaian kaidah dan regulasi yang ada sehingga SKPD dapat mencapai target kegiatan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2018.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD** ini adalah sebesar Rp. 2.502,516,750,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2,107,976,850,- atau 84,23 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD** ini adalah sebanyak 1 program yaitu **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan 21 kegiatan.

Sasaran 2

Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional	Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana	Orang	8	0	0,00
Rata-rata capaian					0,00

Pada sasaran ketiga ini indikator kinerjanya hanya satu dan capaiannya hanya 0,00 % sehingga rata-rata capaian adalah sebesar 0,00% dengan predikat tidak berhasil.

b. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target renstra	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana	Orang	8	4	66,67

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegagalan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional** disebabkan karena tidak adanya aparat Bappelitbangda yang lulus seleksi dalam rangka diklat yang dilaksanakan oleh Bappenas. Hal lain yang menyebabkan kegagalan adalah karena Rendahnya Minat Aparat Bappelitbangda untuk ikut Diklat Perencana.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 162,739,000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 118,105,147 atau 72,57 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 0,00 persen.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional** ini adalah sebanyak 1 program yaitu **Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan 2 kegiatan.

Sasaran 3 Meningkatkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00
Rata-rata capaian					100

Sasaran ketiga ini hanya memiliki satu indikator dan tingkat keberhasilan indikator tersebut sebesar 100% dan rata-rata capaian indikator adalah sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

b. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target renstra 2018	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan** disebabkan karena dilakukannya rapat-rapat rutin terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan hasil rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan** ini adalah sebesar Rp. 868,687,500,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 707,312,250,- atau 81,42 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan** ini adalah sebanyak 1 program yaitu **Program Pengendalian dan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan** dengan 7 kegiatan.

Sasaran 4 Meningkatkan Efektifitas dan Efesiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Efektifitas dan Efesiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	Persentase Kepuasan pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	%	100%	95%	95
Rata-rata capaian					95,00

Sasaran keempat memiliki satu indikator kinerja dengan capaian sebesar 100% sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 95,00% dengan predikat sangat berhasil.

b. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target renstra	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Kepuasan pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	%	100	100	100

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan** disebabkan karena adanya Komunikasi yang baik serta Sumber Daya Manusia Aparat Bappelitbangda yang semakin baik dan meningkat.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 1,391,144,459,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.356,142,622,- atau 97,48 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % persen.

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan** ini adalah sebanyak 1 program yaitu **Program Pelayanan Perkantoran** dengan 9 kegiatan.

Sasaran 5 **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor**

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian					100 %

Sasaran kelima memiliki satu indikator kinerja dengan capaian sebesar 100% sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

b. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target renstra	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
-------------------	--------	--------------------------------	---	-------------

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target renstra	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	%	100,00	100,00	100,00

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor** disebabkan karena adanya Pengadaan serta Pemeliharaan Sarana dan Parasarana Kantor.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 994,878,900,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 857,949,632,- atau 86,24 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen..

e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sarana dan Prasarana Kantor ini adalah sebanyak **2** program yaitu **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan 6 kegiatan dan **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan 2 Kegiatan.

Tabel. 3.2. Perjanjian Kinerja, Program Kegiatan dan Realisasi Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN 2018
Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan regulasi	100.00%	100%	100%
	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	2 Dok	2 Dok	100.00%
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Musrenbang	5 Dok	5 Dok	100.00%
	Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok dan Perubahan	2 Dok	2 Dok	100.00%
	Asistensi Penyusunan RAPBD	Jumlah SKPD yang di Asistensi	38 SKPD	38 SKPD	100.00%
	Pendampingan Penyusunan Renstra	Jumlah SKPD yang didampingi dalam Penyusunan Renstra	37 SKPD	37 SKPD	100.00%
	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Peserta Sosialisasi	4 Paket	4 Paket	100.00%
	Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 Dok	1 Dok	100.00%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	2 Dok	2 Dok	100.00%
	Koordinasi Perencanaan Responsif Gender	Jumlah SKPD Yang menerapkan PPRG	38 SKPD	38 SKPD	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 Dok	1 Dok	100.00%
	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi/Software	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
	Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 Dok	1 Dok	100.00%
	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	400 Org	400 Org	100.00%
	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yang didampingi	12 Desa	12 Desa	100.00%
	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan Kegiatan	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dok	1 Dok	100.00%
	Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1 Dok	1 Dok	100.00%
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen SIPD	1 Dok	1 Dok	100.00%
	Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	100.00%
	Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	100.00%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	100 %
Meningkatnya Jumlah Perencanaan yang memiliki Kompetensi dasar Perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen	6 SKPD	6 SKPD	100%
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan	100.0%	73.91	73.91%
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Tenaga Perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bimtek	23 Org	17 Org	73.91%
	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Workshop	100 Org	0	0
Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	% Program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD	100.00%	100.00%	100.00 %
	Revisi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Jumlah Dokumen Revisi	1 Dok	1 Dok	100 %
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi	1 Dok	1 Dok	100.00%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Revisi Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Ranperda Perubahan RPJMD	1 Ranperda	1 Ranperda	100.00%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Monev pelaksanaan APBD dan APBN rencana pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng	2 Dok	2 Dok	100.00%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJiP Kabupaten	1 Dok	1 Dok	100.00%
	Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key Performance Indicator (KPI)	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Dok	2 Dok	100.00%
	Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Aplikasi/ Software	1 Software	1 Software	100.00%
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan	Program Pelayanan Perkantoran	% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	100.00%	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	12 Kali	100.00%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional	13 Unit	9 Unit	69.23
	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Peralatan Kebersihan	16 Orang, 20 Jenis	16 Orang, 20 Jenis	100.00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/ Penerangan Bangunan	20 Buah	20 Buah	100.00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	15 Jenis	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Terbitan	10 Terbitan	100.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Kas	12 Kali	12 Kali	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1150 Kali	894 Kali	77.73%
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	4 Paket	4 Paket	100.00%
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas - Roda 2	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan - Mesin foto copy	1 Unit	1 Unit	100 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

		- Notebook - Printer	5 Unit 5 Unit	5 unit 5 Unit	100 % 100 %
		- Meja kerja	18 Unit	18 Unit	100%
		- Meja Rapat	1 set	1 set	100%
		- Kursi Kerja	18 buah	18 buah	100%
		- Kursi Rapat	100 buah	100 bh	100%
		- Kursi Tunggu	1 buah	1 buah	100%
		- Kompor Gas	1 buah	1 buah	100%
		- Kulkas 2 Pintu	1 buah	1 buah	100%
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100 %
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara - Roda 2 - Roda 4	12 Unit 1 Unit	12 Unit 1 Unit	100.00% 100.00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara - AC - Mebeleur - LCD	20 Unit 1 Paket 2 Unit	20 Unit 1 Paket 2 Unit	100.00% 100.00% 100.00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara - Komputer/PC - Notebook - Printer	12 Unit 15 Unit 14 Unit	12 Unit 15 Unit 9 Unit	100.00% 100.% 64.29.00%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100.00%	100.00%	100.00%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD	7 Dok	7 Dok	100.00%
	- Laporan Kinerja Bappelitbangda	1 Dok	1 Dok	100.00%
	- LPPD dan LKPJ Bappelitbangda	2 Dok	2 Dok	100.00%
	- RKA Pokok dan Perubahan	2 Dok	2 Dok	100.00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran/ Akhir Tahun	2 Dok	2 Dok	100.00%

3.3. Perjanjian Kinerja (keterkaitan antara RPJMD dan Renstra) dan Realisasinya

Indikator Sasaran RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Indikator SKPD Yang Mendukung
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKP	100.00%	100.00%	100.00%	- Jumlah Dokumen RKP dan RKP Perubahan - Jumlah Dokumen Musrenbang

3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

		Satu	Capaian	Target	Reali	Capai
		an	2017	%	sasi	an
					(%)	(%)
1	Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Dok	ada	ada	ada	ada
2	Presentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100
3	Prensetase Penjabaran RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100
4	Prentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100
5.	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Sertifikat perencana	Orang	4	8	0	0

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Bappelitbangda Kabupaten Soppeng tahun 2018 adalah **Rp 7,552,316,551-** dengan realisasi **Rp 6,796,806,435,- (98,00%)**. Dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

No	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEUANGAN (Rp)	REALISAS	
				KEUANGAN (Rp)	
1	2	3	4	5	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,391,144,459.00	1,356,142,622	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 kali	112,000,000	96,497,663	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit	4,750,000	2,078,410	
3	Penyediaan layanan kebersihan kantor	1 tahun	200,000,000	199,823,802	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penrangan bangunan kantor	20 buah	5,624,000	2,168,000	
5	Penyediaan perlatan rumah tangga	8 Unit	7,677,000	6,913,000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 terbitan	11,000,000	9,410,000	
7	Penyediaan bahan logistik kantor	12 kali	1,400,000	680,000	
8	Rapa-rapat kordinasi dan konsultasi dlam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	1070 kali	644,243,459	641,530,497	
9	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	4 Paket	404,450,000	397,041,250	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		994,878,900.00	857,949,632	
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	17 buah	298,518,900.00	282,656,700	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit(360 m2)	100,000,000.00	83,206,550	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	128,460,000.00	31,449,882	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	48 unit	30,950,000.00	24,600,000	
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	436,950,000.00	436,036,500	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		27,800,000.00	19,664,500	
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dok	9,000,000.00	4,601,250	
16	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 dok	18,800,000.00	15,063,250	

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		2,502,516,750.00	2,107,976,850
17	Penyusunan RKPD	2 dok	92,250,000	82,012,000
18	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5 dok	249,440,000	203,125,000
19	Penyusunan KUA PPAS	2 dok	59,500,000	59,158,750
20	Asistensi Penyusunan RAPBD	38 SKPD	208,150,000	197,400,000
21	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD	37 SKPD	127,275,000	123,356,250
22	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	4 Paket	252,988,000	148,331,600
23	Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	1 dok	146,200,000	93,007,250
24	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	2 dok	42,000,000	8,725,000
25	Koordinasi Perencanaan Responsif Gender	38 SKPD	42,000,000	35,350,000
26	Koordinasi Perencanaan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP)	1 dok	90,101,250	66,076,250
27	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembanguna Daerah	400 Orang	112,900,000	101,103,250
28	Pendampingan Penyusunan RPJM Desa	33 Desa	31,350,000	27,750,000
29	Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak anak	1 dok	33,200,000	30,300,000
30	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	1 Software	218,200,000	217,295,000
31	Penyusunan, Pengumpulan dan analisis Data/ Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	1 dok	15,500,000	3,350,000
32	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaa Bidang Sosbud	1 dok	15,500,000	5,250,000
33	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/ Informasi Kebutuhan Perencanaan bidang Fisik dan Prasarana	1 dok	15,500,000	2,100,000
34	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/ Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 dok	13,787,500	13,787,500
35	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1 dok	18,500,000	10,450,000
36	Penyusunan penelitian dan pengembangan Pembangunan daerah	5 dok	658,750,000	633,949,000
37	Inovasi Pelayanan Publik	6 SKPD	59,425,000	46,100,000

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

V		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan		868,687,500.00	720,879,750
	38	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dok	43,200,000.00	17,075,000.00
	39	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dok	47,287,500.00	47,287,500
	40	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)	1 dok	15,000,000.00	13,567,500
	41	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1 RANPERDA	243,900,000.00	202,269,750
	42	Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key Performance Indikator (KPI)	2 dok	78,700,000.00	58,600,000
	43	Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	1 Aplikasi	158,500,000.00	153,450,000
	44	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 dok	282,100,000.00	228,630,000
VI		Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah		162,739,000.00	118,105,147
	45	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	18 Orang	124,439,000.00	118,105,147
	46	Worshop Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Orang	38,300,000.00	0.00
Jumlah				5,947,766,609.00	5,180,718,501

BAB IV

P E N U T U P

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang disusun untuk menindaklanjuti Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Instansi Pemerintah Daerah dan SKPD wajib menyelenggarakan SAKIP.

Dalam rangka pencapaian kinerja Bappelitbangda terdapat beberapa kendala yang dialami seperti kualitas Sumber Daya Manusia, jumlah tenaga fungsional perencana yang kurang, koordinasi dengan instansi terkait masih lemah dan kerangka regulasi terkadang berubah-ubah. Guna meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Soppeng ke depan, diperlukan langkah-

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

langkah penyempurnaan dengan upaya meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada, koordinasi, profesionalisme aparat perencana, pengendalian dan pengawasan dan penyediaan informasi/data.

Watansoppeng, 04 Februari 2019



